

**PERUMUSAN KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN WISATA GEOSITE
SILAHISABUNGAN KAB. DAIRI DAN SIPISO-PISO TONGGING KAB. KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:
Saberinaita Sembiring ¹⁾
Matius Bangun ²⁾
Universitas Darma Agung ^{1) 2)}

E-mail :
itasaberinasembiring@gmail.com ¹⁾
mbresearch28@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

Since President Joko Widodo has assumed leadership, Indonesia is committed to carrying out the development program of 10 National Tourism Strategic Areas or KSPN with a follow-up through the policy of Presidential Regulation Number 3 of 2016. This policy includes the development of national tourism destinations, one of which is the Lake Toba Region Tourism. The objectives of this study are: To analyze the formulation of the cooperation that has been carried out between the Government of Dairi Regency and Karo Regency and, to develop a strategy of cooperation in the management of the Geosite Silahisabungan of Dairi Regency with the Sipiso Piso Tongging Geosite, Karo Regency. The method used is descriptive qualitative with the conclusions of the study are: a) The collaboration between the Dairi and Karo District Governments is getting stronger after the determination of the two geosites to be included in the Unesce Global Geopark. The Cooperation Strategy is in Quadrant I (First) which uses Strengths, namely the existence of regulations, funding support, as well as the potential of local culture and regional biodiversity by utilizing: The existence of Geosite as a UNESCO Global Geopark, Enthusiasm for the world of tourism, and Stimulus for world tourism actors.

Keywords: Formulation, Cooperation, Between Regions, Tourism

ABSTRAK

Sejak Presiden Joko Widodo memegang kepemimpinan, Indonesia telah berkomitmen mengusung program pengembangan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN dengan tindaklanjut melalui kebijakan Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Kebijakan ini mencakup pengembangan berbagai destinasi pariwisata nasional yang salah satunya adalah pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Menganalisis perumusan tentang kerjasama yang telah dan akan di lakukan antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo serta yaitu 2 (dua) kabupaten yang berbatasan serta Menyusun suatu strategi kerjasama dalam pengelolaan Geosite Silahisabungan Kabupaten Dairi dengan Geosite Sipiso Piso Tongging Kabupaten Karo. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Diskriptif kualitatif dengan kesimpulan penelitian adalah : a) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dairi dan Karo semakin menguat setelah di tetapkannya kedua geosite tersebut masuk dalam Unesco Global Geopark. Berdasarkan analisis SWOT Strategi Kerjasama berada pada Kwadran I (Pertama) yaitu dengan *Menggunakan* Kekuatan yaitu a) Adanya Peraturan, b) Dukungan Pendanaan, serta c) Potensi Budaya Lokal dan keanekaragaman hayati kawasan dengan *Memfaatkan* : a)

Adanya Geosite sebagai UNESCO Geopark Global, b) Antusiasme Dunia Pariwisata, serta c) Stimulus untuk pelaku dunia pariwisata.

Kata Kunci : Perumusan, Kerjasama, Antar Daerah, Pariwisata

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia berkomitmen mengukung program pengembangan 10 (sepuluh) Kawasan wisata sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN yang telah dicanangkan presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yang mencakup pengembangan berbagai destinasi pariwisata nasional. Sebagai tindaklanjutnya pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang di tuangkan pada PP Nomor 50 Tahun 2011 mendasari kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata agar lebih oprasional lagi Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis wisata nasional berkelas internasional.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan ditetapkannya Kaldera Toba sebagai *Unesco Global Geopark* pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis, Selasa, 2 Juli 2020 tersebut yang akan menjadi tantangan tersendiri untuk mempertahankannya. Sesuai dengan misi Unesco tersebut yaitu sebesar besarnya partisipasi masyarakat lokal tentu juga melestarikan berbagai keanekaragaman hayati seperti berbagai tumbuhan, hewan langka dan juga biota perairan.

Adapun Landasan Hukum secara legal formal kerjasama antar daerah dengan daerah lain (KSDD) telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai langkah kongkrit kerjasama antar daerah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah

Demikian juga dalam rangka meningkatkan koordinasi pengelolaan pariwisata di Danau Toba, pemerintah sebelumnya telah membentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 dimana badan ini selain memiliki fungsi Otoritatif yang memiliki kewenangan pengelolaan pariwisata Danau Toba juga memiliki fungsi Koordinatif. Badan ini dapat mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan pariwisata baik secara struktural (Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa). Demikian juga secara fungsional mengkoordinasikan Kabupaten/Kota yang ada di sekitar Danau Toba beserta *stakeholder* lainnya. Untuk itu seluruh Kerjasama yang ada antar

Kabupaten di Kawasan Danau Toba juga harus menyesuaikan kegiatannya dengan Badan Otorita dimaksud,

Secara kelembagaan kerjasama antar daerah adalah suatu keharusan sebagaimana di maksud pada pasal 369 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa Kerja Sama Daerah dilakukan untuk peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.

Setiap wilayah atau daerah dapat menjalin kerjasama yang dilandaskan kepada kepentingan penduduk dan pelayanan publik serta saling menguntungkan satu sama lain. Demikian juga Kerjasama dapat mempertimbangkan daerah yang memiliki daerah berbatasan yang sekawasan seperti Kabupaten Dairi dan Kabupatem Karo.

Penguatan Kerjasama antar daerah tersebut di rasakan kebutuhannya meningkat untuk secara bersama sama antar daerah mengembangkan potensi kawasan Danau Toba khususnya wilayah Kabupaten Dairi dan Karo yang memiliki 2 (dua) geosite yang berbatasan yaitu Geosite Silalahisabunngan dengan geosite Si Piso-Piso Tongging yang merupakan salah satu destinasi. Fenomena lapangan menunjukkan bahwa program dan kegiatan masih berjalan sendiri-sendiri dan belum memiliki suatu wadah Kerjasama yang di legalkan secara formal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang tersebut maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perumusan tentang kerjasama yang telah di lakukan antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo dalam rangka pengelolaan kawasan wisata geosite Silahisabungan Kabupaten Dairi dan Sipiso-Piso Tongging Kabupaten Karo.
- b. Bagaimana Strategi Kerjasama dalam pengelolaan Geosite Silahisabungan Kabupaten Dairi dengan *Geosite* Sipiso-Piso Tongging Kabupaten Karo.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis perumusan tentang kerjasama yang telah di lakukan antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo dalam rangka pengelolaan kawasan wisata *geosite* Silahisabungan dan Sipiso-Piso Tongging.
- b. Menyusun suatu strategi kerjasama dalam pengelolaan *Geosite* Silahisabungan Kabupaten Dairi dengan Geosite Sipiso Piso Tongging Kabupaten Karo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumusan Kerjasama

Kerjasama sebagai sebuah kebijakan publik memiliki siklus secara umum mulai dari Isu, Agenda, Perumusan, Implementasi, Pengendalian dan Evaluasi. Kini Kerjasama antar daerah bukan hanya sekedar isu saja tapi masing-masing daerah seharusnya sudah memiliki agenda dan perumusan meskipun belum di implementasikan secara

forma sebagai kebijakan dalam suatu daerah.

Pada era Reformasi, Teknologi dan Informasi maka Kebijakan kerjasama antar daerah (KAD) adalah suatu keniscayaan mengingat tidak ada daerah yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan masing-masing daerah memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat saling menguntungkan melalui suatu kerjasama atau dengan menciptakan efisiensi dan efektivitas sehingga melalui kerjasama antar akan dapat memberi manfaat antar daerah yang menjalin kerjasama serta meningkatkan rasa persaudaraan antar warga daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerjasama antar daerah akan menghasilkan perekonomian multiganda mulai dari dampak langsung dan tak langsung, dan menciptakan peluang pertumbuhan usaha dan peran serta partisipasi penduduk setempat didalam pengembangan wisata. Tentu saja selain daerah Danau Toba tidak hanya semata untuk meningkatkan perekonomian tetapi terhadap pembangunan yang lain juga berdampak, yang tak kalah pentingnya adalah untuk mempererat hubungan antara aparaturnya atau pemerintah daerah di Kawasan Danau Toba.

2.2 Strategi

Dilihat dari secara global strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang berhubungan dengan ide, pemikiran, sesuatu yang akan dilaksanakan dan

diawasi dari suatu kegiatan yang sudah ditentukan pelaksanaannya. Strategi yang baik adanya kerjasama yang terorganisir dalam sebuah tim kerja, memiliki latarbelakang, mengelompokkan yang mempengaruhi dasar-dasar pelaksanaan yang masuk akal, irit dalam biaya operasional serta punya strategi yang apik untuk mencapai keberhasilan dengan cara yang efektif.

Seperti pendapat Makmur (2009:128), strategi adalah suatu perlakuan yang mampu mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik dalam suatu program ataupun kegiatan

Sementara itu berdasarkan pendapat Quinn (2019) yang memberi makna terkait strategi adalah suatu tindakan dalam sebuah perencanaan yang telah dibentuk dalam sebuah sistem yang berfungsi mengintegrasikan tujuan serta kebijakan dalam suatu organisasi. Strategi yang yang dirumuskan dengan benar sangat menolong pembentukan dan penempatan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi menjadi beda serta sanggup bertahan.

2.3 Pengembangan Wisata

Meskipun sudah ada beberapa peraturan yang melandasi kerjasama antar daerah sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun masih sebagian daerah yang masih mengambil keputusan untuk mengadakan kerjasama antar unit pemerintahan yang ada daerah ini. Pemerintah melalui

Kementerian Pariwisata memiliki kebijakan untuk mengembangkan daerah Danau Toba berdasarkan 3 faktor yaitu: pertunjukan (atraksi), kemampuan mengakses (aksesibilitas), dan kesenangan (amenitas)

- a) *Atraksi*. Atraksi adalah istilah yang digunakan untuk pertunjukan yang berkaitan dengan budaya daerah seperti pagelaran karya sastra, musik, tarian, tradisi/adat istiadat, warisan (peninggalan) sejarah, dan kekayaan alam yang menjadi daya tarik wisatawan di daerah.
- b) *Aksesibilitas*. Aksesibilitas adalah derajat atau tingkat kemudahan yang dicapai terhadap suatu objek, atau ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi yang satu ke lokasi lainnya melalui sistem transportasi baik darat, laut maupun udara.
- c) *Amenitas*. Amenitas adalah berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi. Amenitas bisa berupa fasilitas pariwisata seperti rumah makan tradisional, café, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, kebun percontohan dan lain sejenisnya.

2.4 Geosite Kaldera Toba

Kaldera Toba secara resmi ditetapkan sebagai *Global Geopark* oleh Unesco pada Tanggal 2 Juli 2020 pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif Unesco di Paris, Prancis,

Selasa, 2 Juli 2020. Tidak hanya Kaldera Toba, anggota Dewan Eksekutif telah menetapkan lima belas Unesco Global Geopark yang akan diadakan. Unesco optimis bahwa Kaldera Toba memiliki keterkaitan geologis dan warisan tradisi/kebiasaan hidup dengan penduduk setempat khususnya dibidang budaya dan sumberdaya hayati yang beragam. Inilah yang membuat Unesco mendukung sepenuhnya Kaldera Toba dikembangkan dan dipelihara sebagai bagian dari Unesco Global Geopark (UGG)

Dari 16 lokasi Geosite Kaldera Toba tersebut di huni oleh berbagai etnik khususnya Toba, Simalungun, Karo dan Pakpak. Ada pun posisi seluruh Kaldera berhadapan dengan pantai Danau Toba yang juga dapat di ketemukan berbagai hayati baik flora seperti tanaman air tanaman hutan dan juga fauna khususnya berbagai jenis monyet langka dan ikan tawar di Perairan Danau Toba. Demikian halnya tentunya di daratan juga terdapat berbagai flora berupa vegetasi hutan dan hewan yang khas Danau Toba.

2.5 Kearifan Masyarakat Lokal

Keanekaragaman tradisi budaya setempat yang sering di identikkan dengan Kearifan Masyarakat Lokal serta keanekaragaman hayati yang terjaga akan menjadi pemikat wisata yang diperkirakan akan membuat kunjungan turis akan meningkat sepanjang tahun. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentulah harus senantiasa di tingkatkan dengan

dukungan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan swasta serta ke-7 (tujuh) Kabupaten yang mengitari Danau Toba yaitu Kabupaten Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Simalungun. Bupati Tapanuli Utara yang memiliki kearifan lokal masing masing daerah sendiri sendiri.

2.6 Keanekaragaman Hayati

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Unesco, (2020) bahwa mengatakan Indonesia dapat mengembangkan Geopark Kaldera Toba melalui jaringan *Global Geoparks Network dan Asia Pacific Geoparks Network* khususnya dalam kaitan pemberdayaan masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati yang ada di Kaldera Toba. Berbagai tradisi kearifan lokal yang terdapat pada kawasan geosite Silahisabungan Kabupaten Dairi dan Sipiso-Piso Tongging Kabupaten Karo seperti upacara adat, pesta perkawinan, keagamaan dan sejenisnya. Demikian keanekaragaman hayati baik perairan khususnya Danau Toba juga di daratan seperti tanaman pertanian dan kehutanan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berbagai Studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain adalah :

a) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menemukan Strategi pemda di wilayah sekretariat daerah kab. Bolang Mongondow Utara meliputi 3 hal yang

menjadi kiat pemda yang terprogram adalah:

1. Mengembangkan kompetensi orang-orang yang terlibat.
2. SOP dan SPM semakin dikembangkan
3. Memaksimalkan sarana prasarana dimana keberadaannya masih jauh dari yang diinginkan

Penelitian lain yang di lakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara tentang Kebutuhan Inovasi dan Teknologi dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba Tahun 2017 mengekspose hasil penelitiannya bahwa efektivitas kerjasama antar daerah di Kawasan Danau Toba tersebut masih rendah, hal ini karena masih adanya kendala sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antar daerah karena ego kedaerahan sehingga berpengaruh dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah ketika sudah menyentuh level teknis operasional di masing-masing sektor. Kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba berupa peningkatan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten sekeliling Danau Toba dalam hal :

- 1) pembangunan infrastruktur pariwisata melalui pembagian tugas dan tanggungjawab secara jelas sesuai standar sebagaimana kebutuhan sebagai suatu kawasan pariwisata;
- 2) pembangunan industri kreatif berbasis inovasi dan teknologi lokal untuk

- menghasilkan berbagai produk tentang pariwisata;
- 3) Perda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Danau Toba, dan kebijakan Pemerintah Daerah tentang Standar Halal, Harga dan Pelayanan,
 - 4) Paket wisata dengan Ikon “Go Danau Toba”; dan
 - 5) Kajian tentang inovasi sosial guna untuk merubah mindset masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan wisata
 - 6) Selanjutnya Yoky Ferdinan dkk (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Wisata Alam Berbasis Ekowisata (Studi pada Disparbud Kabupaten Nganjuk) berdasarkan program-program yang dimiliki Dinas Pariwisata, dimana program pengembangan objek wisata belum berjalan dengan baik, dikarenakan dengan dana yang dialokasikan pemerintah sangat minim yang mengakibatkan semua program terkendala, padahal sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut menakjubkan.

Melihat rencana yang dimiliki Dinas Pariwisata Kab. Nganjuk, prospek pengembangan objek wisata belum maksimal, salah satunya objek wisata air merambat di Roro Kuning, banyak hal yang harus dibenahi dan dibutuhkan perhatian khusus dengan dana yang minim, sehingga pengembangannya tidak terlaksana dengan baik.

2.8 Kerangka Berpikir

Dari uraian tersebut baik Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tinjauan Teori dan Penelitian terdahulu maka Kerangka Berpikir dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan ditetapkannya Geopark Kaldera Toba sebagai salah satu Unesco Global Geopark maka perlu ditingkatkan Kerjasama Antar daerah (KAD) dalam pengelolaan kawasan Geopark Kaldera Toba dalam hal ini antara Kabupaten Dairi dan Karo.
- 2) Kerjasama tersebut fokus dalam rangka program dan kegiatan Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas untuk mendukung pemberdayaan tradisi budaya lokal dan Kelestarian Keanekaragaman Hayati sebagaimana yang di maksud UNESCO.
- 3) Melalui kerjasama antar daerah tersebut akan diperoleh efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kepariwisataan berbasis tradisi budaya lokal dan keanekaragaman hayati dalam pengembangan Kawasan Geopark Kaldera Toba khususnya geosite Silahisabungan Kabupaten Dairi dan Sipiso-Piso Tongging Kabupaten karo.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dikemukakan Basri (2014) konsentrasi penelitian kualitatif terletak pada detail

caranya serta makna dari hasilnya. Fokus riset dari kualitatif lebih kepada subjeknya, objek dan organisasinya, serta kaitannya atau hubungan kerkaitan diantara masing-masing.

Ditambahkan oleh Sugiyono (2017) bahwa riset kualitatif merupakan penelitian dimana peneliti melihat keadaan objek yang alamiah, dan sebagai instrument kuncinya adalah peneliti itu sendiri.

3.2 Pendekatan

Desain yang digunakan adalah deskriptif seperti yang dikemukakan Moleong (2017:44), pendekatan yang mengangkat keadaan sosial, yang menggambarkan kenyataan, cara yang digunakan untuk menganalisis data yang benar didukung oleh proses penelitian yang baik dan menghasilkan fakta deskriptif dimana hasilnya diperoleh dari kondisi yang ilmiah akan di diskripsikan data dan infasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan lapangan), study literatur, studi media, kepustakaan dan lain sebagainya.

3.3 Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data Primer di lakukan dengan Wawancara dan Observasi lapangan. Wawancara di lakukan dengan informan utama dan informan pendukung. Adapun Informan utama tersebut adalah :

Tabel 1. Daftar Informan Utama pada penelitian, 2021

No.	Nama	Jabatan
1.	Mahadi Kudadiri, SH	Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Dairi
1.	Hotmaida Butar Butar M.T	Kepala Bappeda Kab. Dairi.
2.	Munarta Ginting	Kepala Dinas Pariwisata Kabuupaten Karo
4.	Ir. Amal Sembiring	Sekretaris Bappeda Kabupaten Karo
5.	Hamaska Silalahi S.Pt MM	Camat Silahisabungan
6.	Data Martina Ginting M.Si	Camat Merek Kabupaten Karo
7.	Anggiat Sihaloho	Kepala Desa Silalahi I Kec. Silahisabungan
8.	Jonh Freddy Girsang	Kepala Desa Tongging Kec. Merek Karo

Sumber Hasil seleksi Informan oleh peneliti, 2021.

- b. Wawancara dalam riset kualitatif dilaksanakan dengan sistem snowball dimana pernyataan ataupun jawaban dari informasi kunci akan dilanjutkan ke informan tambahan agar data dan hasil yang didapat jelas dan komplit.

3.4 Analisis Data

- a. Analisis kebijakan adalah Teknik atau aktifitas mensintesa suatu keterangan termasuk hasil akhir dari sebuah penelitian, agar mendapat rujukan pilihan desain kebijakan. Kebijakan umum adalah aturan pemerintah yang berdampak pada perilaku individu dalam kelompok warga.

(Panjar Situmorang, 2003)

- b. Analisis SWOT yaitu analisis yang di gunakan untuk menentukan Strategi yang akan di gunakan dalam melaksanakan Kerjasama antar daerah melalui kegiatan Atraksi, Aksesibilitasm Amenitas dengan memberdayakan masyarakat lokal dan melestarikan keanekaragaman hayati.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Potensi Kawasan

Dari hasil observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap buku, jurnal, dan studi media masa dapat di inventarisasi jenis wisata Kawasan adalah :

- a) Wisata Budaya.

Wisata budaya ini dilakukan para wisatawan atas dasar keinginan untuk memperluas wawasan dan pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat wisata. Salah satu jenis wisata yang berciri khas budaya adalah pelestarian tenun adat atau ulos yang terdapat di Desa Silalahi I, Silalahi II, Silalahi III, Paropo I dan Paropo. Jenis ulos ini juga sedikit berbeda dari ulos

dari Karo, Simalungun, Toba, dan Dairi pada umumnya. Di kawasan ini juga terdapat lokasi wisata budaya yaitu adanya Tugu Silalahi Sabungan yang merupakan tugu Raja Silalahi Sabungan.

- b. Wisata Bahari/Air.

Wisata jenis ini di kaitkan dengan perairan di mana dalam hal ini adalah wisata air Danau Toba yang selain keindahan alam juga mandi dan menyelam, memancing, sepeda air yang ada di Desa Tongging, serta Silalahi dan Paropo

- c. Wisata Pertanian.

Didukung oleh keanekaragaman bidang hortikultura seperti bawang dan tanaman mangga sampai saat ini masih tetap di usahakan oleh masyarakat setempat. Informan yaitu Camat Silalahi Sabungan menjelaskan bawang sampai saat ini tetap menjadi sumber mata pencaharian masyarakat khususnya di Silalahi dan Paropo sementara tanaman buah mangga perlu perhatian instansi pemerintah karena telah banyak berusia tahunan sehingga perlu dilakukan peremajaan.

- d. Wisata Alam.

Wisata ini adalah para wisatawan dapat menikmati pemandangan alam yang asli atau bukan buatan manusia di mana selain keindahan alam danau juga air terjun Si Pisopiso. Air Terjun Sipisopiso yang terdapat di kawasan KS2T.

- e. Wisata Kuliner.

Wisata kuliner berbasis budaya lokal adalah berbagai jenis makanan dan panganan dengan bahan baku dari komoditi

pertanian yang terdapat di Kawasan KS2T antara lain adalah ikan arsik (mas dan nila), ikan bakar (mas, nila dan lele), ikan nati nombur, ayam pinadar. Demikian panganan tradisional antara lain ubi (rebus dan bakar), jagung (rebus dan bakar).

4.2 Pengembangan Kawasan

Pengembangan kawasan KS2T pada gilirannya akan menciptakan lapangan pekerjaan, karena usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat pedesaan, sehingga dapat menahan atau mengurangi arus urbanisasi yang semakin meningkat saat ini. Manfaat yang dapat diperoleh dari kawasan KS2T adalah melestarikan sumberdaya alam, melestarikan kearifan lokal, dan meningkatkan pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata.

Wawancara yang di lakukan dengan informan kunci yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Dairi Sdr. Mahadi Kudadiri, SH mengatakan bahwa Bupati Dairi telah menginstruksikan agar mendata ulang aset pemerintah yang dapat menunjang pariwisata, memohon adanya system yang jelas serta tempat yang menarik agar investor tertarik pada lokasi yang telah dipilih pemerintah daerah. Pihaknya memohon agar anggaran dibuat untuk mengembangkan daerah wisata tersebut yaitu di kawasan KS2T pada perubahan penyusunan APBD 2021. Informan Kunci lainnya yaitu Camat Silahisabungan Hamaska Presdi Ardianto

Silalahi menguraikan desa sekecamatan silahisabungan telah disepkati sebagai desa wisata berdasarkan SK Bupati Dairi Nomor 535/556/VI/2019 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Dairi Tanggal 12 Juni 2019.

4.3 Jenis Wisata

Persepsi masyarakat harus dibangun melalui berbagai pemahaman yang terus menerus sehingga memiliki kesamaan pemahaman sehingga menjadi asset dalam pengembangan kawasan wisata KS2T tersebut. Kawasan KS2T yang di kembangkan sejalan dengan kebijakan kementerian tersebut yaitu :

- a) Atraksi Wisata yaitu daya tarik wisatawan untuk berlibur dengan menampilkan materi dan lokasi bernuansa tradisi masyarakat lokal seperti gondang/tor-tor pada pesta perkawinan ataupun orang meninggal dunia. Demikian juga berorientasi terhadap kelestarian keanekaragaman hayati baik tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan kehutanan menjadi daya tarik tersendiri.
- b) Aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk menjangkau lokasi lokasi wisata di kawasan wilayah-wilayah sentra KS2T akan sangat menentukan pengembangan wisata tersebut. Dari sisi tanaman pangan dan hortikultura maka wisatawan seyogianya dapat menjangkau objek objek wisata baik wisata alam seperti keindahan alam seperti danau dan air terjun Si Piso-piso; wisata budaya seperti

tempat tempat kerajinan pembuatan pakaian tradisional seperti ulos; wisata pertanian (agrowisata) seperti sapo juma di Tongging Kecamatan Merek, wisata kuliner seperti rumah makan dan restaurant, cafe cafe dan hotel.

c) Amenitas. Selain Atraksi dan Aksesibilitas maka Amenitas yaitu kuliner-kuliner yang bersumber dari bahan baku masyarakat setempat seperti jagung rebus dan bakar, kacang rebus serta rumah makan yang menghadirkan produk kecamatan tersebut seperti ayam kampung, bebek/itik, sate kambing, ikan air tawar serta panganan lainnya. Sedapat mungkin agar dapat mengurangi hasil-hasil pertanian yang bersumber dari luar daerah seperti ikan laut, sapi/lembu dan lainnya.

4.4 Pelaku Wisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 bahwa Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan. Pelaku Pariwisata dan sangat menentukan dalam pengembangan kawasan KS2T. Meskipun mereka memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi harus diperhitungkan dalam pengembangan pariwisata tersebut. Para pelaku pariwisata tersebut antara lain adalah : wisatawan, industri pariwisata, pemerintah, masyarakat lokal.

4.5 Kerjasama Antar Daerah

Melalui kerjasama daerah maka setiap daerah harus dapat kerjasama ini sebagai momentum untuk lebih maju dan bukan sebaliknya menimbulkan egoisme daerah yang akan memunculkan fenomena negative dan bisa menjadi permasalahan yang membuat tidak nyaman antara lain timbulnya sentimen primordial, perpecahan antara daerah, meningkatnya KKN, pemicu masalah antar masyarakat, kesewenangan menggunakan sumber daya alam serta memunculkan perilaku yang tidak memiliki empati terhadap suatu daerah. Pratikno dkk (2007) menjelaskan dilihat secara universal masalah antar daerah termasuk prasarana layanan publik beraneka ragam dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Oleh sebab itu landasan yang digunakan sebagai kerjasama antar daerah bermacam-macam.

4.6 Bentuk Kerjasama

Disamping kerjasama antar daerah, saat penelitian ini dilakukan telah terbentuk beberapa yang pada dasarnya akan menjadi faktor pendorong dalam kerjasama antar daerah tersebut. Beberapa bentuk asosiasi yang telah ada di Indonesia sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Patterson (2008) kerjasama antar pemerintah daerah (*intergovernmental cooperation*) diarahkan sebagai pengelolaan dan pengembangan kerjasama daerah yang didasarkan pada hal sebagai berikut :

a. *Equal Partnership* atau rekan sejawat

- b. Bergabung dan memiliki hubungan timbal balik
- c. *Need-Based* atau berlandaskan sesuatu yang dibutuhkan
- d. *Engagement and ownership* atau orang-orang yang ikut serta dan pemilik
- e. Luwes
- f. Legalitas
- g. Lancar
- h. Tanggung jawab dan tidak ada yang ditutupi atau terbuka
- i. Berkesinambungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terakhir di rubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga. Dalam pasal 169 dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

4.7 Strategi Kerjasama

Dalam rangka menentukan strategi pengembangan kawasan KS2T yang merupakan kawasan wisata Geosite Silalahisabungan Kecamatan Silalahisabungan dan Geosite Sipiso-piso Tongging yang merupakan Unesco Global Geoprk Kaldera Toba maka di lakukan analisis Strength Weakness Opportunity

Treats (SWOT) yaitu suatu analisa mengkaji Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) dalam pengembangan KS2T tersebut.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan suatu penilaian terhadap faktor-faktor internal alam pengembangan Agrowisata Kecamatan Merek yang dilakukan mencakup kekuatan dan kelemahan yang dimiliki selanjutnya menyusun faktor-faktor tersebut kedalam tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Faktor Kekuatan :

- Adanya kesamaan pemahaman pentingnya kerjasama antar daerah (KAD).
- Dukungan masyarakat lokal untuk pengembangan kawasan.
- Potensi tradisi kearifan lokal dan keanekaragaman hayati.

2) Faktor Kelemahan

- Kurangnya pemahaman akan bentuk kerjasama,
- Penurunan kualitas sumberdaya alam danau,
- Kondisi sarana dan prasarana fasilitas umum masih rendah

Jika faktor Kekuatan dan Kelemahan tersebut di analisis dengan SWOT maka dapat di jabarkan hasilnya seperti berikut :

Tabel 2. Faktor Kekuatan dan Kelemahan Kerjasama Antar Daerah, 2021

N o.	Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1,	Kesamaan pemahaman pentingnya kerjasama antar daerah (KAD)	4 (0.400)	4	1.600
2,	Dukngan masyarakat lokal untuk pengembangan kawasan.	3 (0.300)	3	0.900
3	Potensi tradisi kearifan lokal dan keanekaragaman hayati.	3 (0.300)	2	0.600
	Sub total	A=10.00	-	B=3.100
N o.	Kelemahan	Bobot	Rating	Skor
1.	Kurangnya pemahaman akan bentuk kerjasama	3 (0.375)	3	1.125
2.	Penurunan kualitas sumberdaya alam Danau Toba	3 (0.375)	4	1.500
3.	Kondisi	2	2	0.250

sarana dan prasarana fasilitas umum masih rendah	(0.125)		
sub total	C=8.00	-	D=2.875.
Total	A=10.00	-	B=3.100

Sumber : di olah oleh peneliti dari faktor Kekuatan dan Kelemahan KAD, 2020

b. Faktor Eksternal

Analisis faktor strategi eskternal merupakan suatu penilaian terhadap faktor-faktor eksternal dalam pengembangan kawasan Agrowisata Kecamatan Merek yang berbasis Persepsi dan Partisipasi yaitu sebagai berikut :

1) Peluang

- Penetapan Geosite Silahisabungan dan Si Piso-Piso Tongging sebagai Geosite UNESCO Global Geopark,
- Adanya payung KAD sebagai dasar pengembangan kawasan.
- Dukungan Pendanaan dari Pemerintah (pusat dan daerah) serta swasta.

2) Ancaman

- Bencana alam khususnya wabah penyakit seperti covid 19
- Persaingan dengan munculnya kawasan wisata baru khususnya di Sumatera Utara,
- Adanya pungutan pungutan di luar yang resmi

c. Faktor Eksternal

Penjabaran apa itu strategi eksternal adalah bagian dari suatu pengamatan terhadap faktor eksternal terkait pengembangan kawasan Agrowisata Kecamatan Merek yang berbasis Persepsi dan Partisipasi yaitu sebagai berikut :

3) Peluang

- Penetapan Geosite Silahisabungan dan Si Piso-Piso Tongging sebagai Geosite UNESCO Global Geopark,
- Adanya payung KAD sebagai dasar pengembangan kawasan.
- Dukungan Pendanaan dari Pemerintah (pusat dan daerah) serta swasta.

4) Ancaman

- Bencana alam khususnya wabah penyakit seperti covid 19
- Persaingan dengan munculnya kawasan wisata baru khususnya di Sumatera Utara,
- Adanya pungutan pungutan di luar yang resmi

Hasil analisis antara factor internal dan factor eksternal dapat dibuat dalam bentuk program swot dilihat dari sebelumnya kemudian ditingkatkan kedalam bentuk angka atau statistic dengan menerapkan analisis SWOT supaya diketahui letak

kerjasama yang dilakukan daerah sebenarnya bagaimana.

Apa yang diperoleh dari kedua angka hasil pengurangan dapat ditambahkan kedalam diagram swot. Kepastian pengurangan antara nilai kekuatan dengan nilai kelemahan ditempatkan pada sumbu X, sementara kepastian pengurangan antara nilai peluang dengan nilai ancaman diposisikan pada sumbu Y.

Posisi titik yang didapatkan menggambarkan posisi keberlangsungan usaha yaitu Sumbu X.

Berdasarkan analisis Kuadran SWOT maka Kerjasama antar daerah dalam mengembangkan Kawasan Silalahisabungan Kabupaten Dairi dan Sipiso-Piso Tongging Letak dari analisis swot berada pada kuadaran I (Pertama) diberi nama tindakan agresif dimana strategi menggunakan kemampuan atau daya sekaligus menggunakan kesempatan yang ada.

5. SIMPULAN

Adapun kesimpulan penelitian ini adalah :

- a. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Dairi dan Karo dalam Pengelolaan Kawasan Wisata geosite Silahisabungan (wilayah Dairi) yang berbatasan dengan geosite Sipisopiso Tongging (wilayah Karo) semakin menguat setelah di tetapkannya kedua geosite tersebut masuk dalam Unesce Global Geopark.

- b. Secara Internal faktor-faktor dalam penelitian ini dengan Kekuatan yaitu Adanya peraturan untuk melaksanakan kerjasama antar daerah, dukungan pendanaan baik dari pusat, provinsi, maupun swasta, serta Potensi budaya lokal dan keanekaragaman hayati kawasan sedangkan faktor Kelemahan adalah : Belum adanya keseriusan daerah dalam bekerjasama, Masih memikirkan kepentingan daerah masing-masing, dan Sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah.
- c. Secara Eksternal Faktor peluang dalam kerjasama ini adalah : Adanya geosite sebagai UNESCO Geopark Global, Antusiasme dunia pariwisata, dan Stimulus untuk pelaku dunia pariwisata; sedangkan Ancaman terdiri dari Wabah penyakit seperti covid 19, Berkembangnya daerah wisata lain dan Kebakaran hutan.
- d. Strategi Kerjasama antar Daerah berdasarkan analisis SWOT adalah berada pada Kuadran I (Pertama) yaitu menggunakan Kekuatan yaitu Adanya peraturan untuk melaksanakan kerjasama antar daerah, Dukungan pendanaan baik dari pusat, provinsi, maupun swasta, serta Potensi budaya lokal dan keanekaragaman hayati kawasan dengan memanfaatkan : Adanya Geosite sebagai UNESCO Geopark Global, Antusiasme dunia pariwisata, serta Stimulus untuk pelaku dunia pariwisata.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bimo Walgito. 2002. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Bungin, Burhan.2007.Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika
- Cornelius dkk (2015) Analisis Pembangunan Berbasis masyarakat Dalam Pengembangan Sumber daya manusia.
- Gunaryo et al. 2008. Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 Rencan Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2025. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Gunawan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Irlan Adiyatma dkk (2018) Bahan Untuk Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN BAPPENAS 2018. Universitas Padjajaran Bandung, 2018.
- Isa Wahyuni, 2009 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. LAPORAN AKHIR Laporan Akhir Analisis Kebutuhan Inpvasi dan Teknologi untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kawasan daau Toba. Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Utara 2017.
- Mardiasmo, (2004), Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi

- Mardiasmo, (2006), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi
- Marpaung, Happy 2002. Pengetahuan Kepariwisata. Bandung :Alfabeta.
- Mashuri dan M. Zainudin. 2009. Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung : Refika Aditama.
- Panjar Situmorang (2003) Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1, No. 1, Maret 2003 : 1-21
- Pinata, I Gde dan Putu G. Gayatri 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : Andi
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
- Puspa Wardani 2016 Kontribusi Pengembangan Pariwisata danau Toba melalui Skema BOP (Badan Otorita Pariwisata) bagi Masyarakat Sekitar Danau Toba.
- Sjafrizal (2009:291) Strategi sebagai Alat untuk mencapai tujuan Perusahaan (institusi) . Jurnal Manajemen/Volume XX, No. 02, Juni 2016
- Jurnal-Jurnal:**
- Andhi Pranata dkk (2006). Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dalam pengelolaan Sumber daya Air (Studi Pada Kerja Sama Kota Malang dengan Kota Batu dan Kota Malang dengan Kabupaten Malang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air). Universitas Brawijaya, Malang E-mail: andhipranata@yahoo.com.
- Marwanti (2015) Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat. Caraka Tani – Journal of Sustainable Agriculture, Vol. 30 No. 2, Oktober 2015. Hal. 48-55. Sharpley (2000)
- Rudianta Sitorus. 2012. Potensi obyek wisata dan keterpaduannya dalam pengembangan Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan Volume 6 Nomor 1 Juli 2018 73 kawasan agropolitan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Jurnal Lanskap Indonesia, 4(1) : 37-42.MOSHER, A.T. 1965. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Jakarta : C.V. Yasaguna
- Muzha VK, Ribawanto H, Hadi M. 2013. Pengembangan agrowisata dengan pendekatan Community Based Tourism (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Batu dan Kusuma Agrowisata Batu). Jurnal Administrasi Publik. Jurnal Elektronik Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik.1(3).
- Sumarwoto, J. 1990. Pengembangan Agrowisata: Potensi dan ProspekSeminar Nasional: Pembangunan Pertanian & Pedesaan SumateraBerastagi, 5-8
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge (2009). Organizational Behavior, 13th Ed.. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2009.
- Suwarta (2015) Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat pada

Usahatani Terpadu guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Sistem Pertanian. Jurnal Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Peraturan :

Perundang-Undangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11)

Priasukmana at al 2001. Pembangunan desa wisata : Pelaksanaan Undang-Undang otonomi daerah. Info Sosial ekonomi, 2(1) : 37- 44

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Yoky Ferdinan dkk (2012). Pengembangan Wisata Alama Berbasis Ekowisata (Studi pada Disparbud Kabupaten Nganjuk) Jurusan Adminstrasi Publik Fakultas Adminstarsi Negara Universitas Brawijaya Malang.

|